

## **Ekonomi Syari'ah Solusi dalam Menghadapi Krisis Moneter (Perbandingan Malaysia – Indonesia)**

**Hansen Rusliani**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sultan Tahan Saifudin

Email: muhammadhansenrusliani@gmail.com

### ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ekonomi syari'ah sebagai solusi terbaik dalam menyelesaikan persoalan krisis ekonomi global. Syari'ah Islam yang sempurna mampu memberikan jalan keluar dari cengkaman krisis ekonomi global yang banyak melanda negara-negara saat ini. Studi perbandingan digunakan untuk membandingkan bagaimana langkah-langkah kedua negara, Indonesia-Malaysia dalam menanggapi krisis ekonomi global. Ekonomi syari'ah merupakan salah satu langkah signifikan yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi negative spread dan kerentanan ekonomi global. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ekonomi syari'ah merupakan solusi untuk menghadapi krisis ekonomi global. Perbankan syari'ah membantu dalam menanggulangi beban krisis dalam jangka pendek dan juga pada masa yang akan datang.*

**Kata kunci:** *Ekonomi Syari'ah, Syari'ah Islam, Negative Spread, dan Krisis Ekonomi Global*

### ***Abstract***

*This study aims to find out the shari'ah economy as the best solution in solving the problem of the global economic crisis. Perfect Islamic law is able to provide a way out of the grip of the global economic crisis that has hit many countries today. Comparative studies are used to compare how -step of the two countries, Indonesia-Malaysia in tackling the global economic crisis. Shari'ah economics is one of the significant steps that must be taken by the government in dealing with negative spreads and global economic vulnerability. Data used in this study are secondary data. The results of this study shows that the Shari'ah economy is a solution to face the global economic crisis. Banking of the Shari'ah helps in overcoming the burden of the crisis in the short term and also in the future.*

**Keywords:** *Syari'ah Economy, Syari'ah Islam, Negative Spread and the Global Economic Crisis*

## Pendahuluan

Kekacauan keuangan global di akhir tahun 1990-an merupakan episode terakhir serangkaian “*mania, panik dan kehancuran*” keuangan yang telah menggoncang kapitalisme internasional dalam tigaratus tahun terakhir<sup>1</sup>. Permasalahan keuangan tahun 1990 dalam banyak segi memiliki kemiripan dengan para pendahulunya. Sebagaimana “tulip mania” (1637) di Belanda dan Gelembung Laut Selatan ((1970) di Inggris serta skema-skema “kaya mendadak” lainnya, keserakahan para investor internasional membuat mereka dengan mudah melakukan investasi penuh resiko pada pasar-pasar yang sedang bangkit di Asia Timur<sup>2</sup>. Selanjutnya ketika bom investasi mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan, para investor berlarian dengan paniknya meninggalkan kehidupan yang berantakan. Meski demikian, terdapat beberapa perbedaan penting antara episode-episode terdahulu dengan krisis tahun 1990-an. Sementara krisis-krisis terdahulu terbatas pada pasar wilayah-wilayah tertentu di dunia, besarnya skala dan kecepatan arus keuangan internasional maupun laju arus informasi sekarang ini telah menghasilkan satu situasi di mana dengan satu pijitan tombol, milyaran dollar dapat berpindah dari satu negara ke negara lain, dan seluruh permukaan bumi dapat terseret ke dalam pusaran<sup>3</sup>.

Krisis keuangan Asia Timur di akhir tahun 1990-an dan kekacauan keuangan global telah mengangkat isu keuangan internasional sebagai agenda puncak permasalahan yang menghadang ekonomi global. Banyak pakar dan pemerintah yang memandang gejolak ekonomi ini sebagai ancaman paling serius terhadap ekonomi internasional sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua dan Depresi Besar tahun 1930-an sebelumnya pernah menyatakan telah belajar

bagaimana memperhatikan kinerja ekonomi namun gagal dalam memperkirakan datangnya krisis, secara fundamental mengabaikan penyebab-penyebab dasarnya, dan secara sengit memperdebatkan cara-cara terbaik pemecahan krisis tersebut. Selanjutnya para ekonom dan pejabat publik tidak menyepakati tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan untuk mencegah krisis keuangan masa depan. Dengan tercerai-berainya para ekonom professional, hanya sedikit panduan yang tersedia untuk membantu orang memahami kekacauan di dalam pasar keuangan global dan apa yang sekiranya perlu dilakukan untuknya.

Terulangnya krisis keuangan membuat orang mempertanyakan rasionalitas pasar dan bagaimana para aktor yang rasional berkali-kali terjebak dalam bom dan mania investasi yang hampir selalu menghasilkan kepanikan dan krisis keuangan. Atau dalam istilah lain, seandainya para aktor ekonomi bersikap rasional, sebagaimana mereka seharusnya menurut asumsi para ekonom, bagaimana orang berharap kepada pasar keuangan yang seringkali sama sekali tidak rasional.

Sikap meremehkan para ekonom professional menyangkut bahaya dan konsekuensi-konsekuensi destabilisasi krisis keuangan internasional ditentang oleh Hyman Minski dalam teorinya “ketidakstabilan keuangan” krisis keuangan<sup>4</sup>. Menurut teorinya, krisis keuangan adalah ciri melekat dan tidak dapat dihindari dalam sistem kapitalis dan sebenarnya terlihat jelas dan dapat diperkirakan. Spekulasi penuh resiko, ekspansi moneter (kredit), kenaikan harga aset-aset yang banyak diminati, kejatuhan tajam harga aset-aset secara mendadak dan tidak terduga, dan penukaran besar-besaran ke dalam bentuk uang atau investasi berkualitas merupakan endemi dalam upaya para investor

<sup>1</sup>Charles P. Kindleberger (1988), *Manias, Panics and Crashes*. New York: Basic Books.

<sup>2</sup>Robert Gilpin and Jean Millis (2002), *Tantangan Kapitalisme Global, Ekonomi Dunia Abad ke-21*. Cetakan Pertama, Jakarta: Divisi Buku Pilihan, PT Raja Grafindo Persada, Murai Kencana, hal. 138.

<sup>3</sup>Robert Gilpin and Jean Millis (2002), *Ibid.*, hal. 138.

<sup>4</sup>Diskusi teori krisis keuangan Minsky ini didasarkan pada Kindle-berger's *Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises*. Tulisan Minsky tentang subjek ini dapat ditemukan dalam Hyman P. Minsky, *Can "It" Happen Again? Essays on Instability and Finance* (Armonk, NY.: M.E. Sharpe, 1982).

internasional dalam mengejar keuntungan besar. Investasi spekulatif dalam pasar-pasar yang sedang tumbuh oleh *hedge fund* yang berhutang besar telah meminyaki keadaan mania dan gelembung investasi hingga runtuhnya baht Thailand tanggal 2 Juli

1997 yang merupakan sinyal berakhirnya keajaiban Asia Timur. Entah bagaimana dalam setahun kemudian, pertengahan bulan agustus 1998, devaluasi rubel Rusia dan berita-berita buruk dari Rusia lainnya memicu kekacauan keuangan global.

### Kronologi Krisis Keuangan Asia Timur dan Penyebarannya<sup>5</sup>.

Tabel 5.

<b>Juli 1997</b>	Thailand di bawah tekanan kuat para spekulan internasional, membalikkan kebijakan pengikatan baht terhadap dollar dan membiarkannya mengambang. Tindakan ini yang merupakan sinyal seriusnya permasalahan ekonomi-ekonomi Asia Tenggara, memicu terjadinya krisis. Penularanpun mulai menyebar ke seluruh wilayah. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad menyatakan “para spekulan culas”.
<b>Agustus 1997</b>	Dana moneter internasional (IMF) menyetujui paket pinjaman \$17 milyar kepada Thailand. Mahathir menyebut George Soros sebagai “tolol”.
<b>Oktober 1997</b>	Pasar saham Hong Kong (Hang Seng) jatuh sebesar 25 persen dalam empat hari dan beberapa hari berikutnya turun lagi sebesar 5,4 persen, menyebabkan kejatuhan besar pada pasar saham Amerika dan tempat-tempat lain. IMF menawarkan rencana penyelamatan \$42 milyar kepada Indonesia.
<b>November 1997</b>	Krisis menyebar ke Brazil, dan won Korea Selatan ambruk. Di Jepang, Yamaichi Securities tutup, memberi sinyal seriusnya permasalahan ekonomi Jepang. Clinton menyebut krisis tersebut “beberapa masalah kecil di jalan”.
<b>Desember 1997</b>	IMF menyetujui pinjaman sebesar \$58 milyar, paket penyelamatan terbesar yang pernah ada untuk menyelamatkan ekonomi Korea Selatan yang tercerai-berai dengan cepatnya.
<b>Januari 1998</b>	IMF dan Indonesia menandatangani satu kesepakatan reformasi ekonomi ketika Indonesia tenggelam ke dalam krisis.
<b>April 1998</b>	Ekonomi Jepang menunjukkan peningkatan tanda-tanda seriusnya permasalahan. Satu lagi kesepakatan antara IMF dan Indonesia ditandatangani. Kinerja IMF di Asia semakin diserang oleh Kongres Amerika Serikat.
<b>Mei 1998</b>	Krisis politik di Indonesia berlanjut dengan turunya mahasiswa ke jalan dan semakin buruknya buruknya berita-berita ekonomi. Presiden Soeharto mengundurkan diri.
<b>Agustuts 1998</b>	Devaluasi rubel dan berita-berita negatif dari Rusia lainnya menyebabkan kepanikan pasar di seluruh permukaan bumi, termasuk penurunan tajam pasar saham Amerika. Real Brazil mulai mengalami serangan.
<b>Oktober 1998</b>	IMF, dengan dukungan kuat Amerika, memberikan paket bantuan raksasa lebih dari \$40 milyar disertai dengan tuntutan bahwa Brazil harus melaksanakan perbaikan ekonomi secara signifikan.
<b>Januari 1999</b>	Kegagalan Brazil untuk melakukan langkah-langkah penting untuk mereformasi ekonominya mengakibatkan devaluasi real Brazil sebesar 35 persen dan larinya investor.

<sup>5</sup>Robert Gilpin and Jean Millis (2002), *op.cit*.hal. 149.

## Pembahasan

### Perbankan Syari'ah Menjadi Solusi bagi Krisis Moneter

Menjalankan prinsip syari'ah tidak hanya membawa berkah<sup>6</sup> tetapi lebih dari itu, menjalankan prinsip syari'ah akan membawa peluang untuk memperbaiki kondisi yang tidak normal (krisis moneter). Itulah yang diperlihatkan bank-bank yang beroperasi secara syari'ah. Pada saat perbankan nasional tengah dijangkiti '*virus*' *negative spread* - kerugian akibat bunga simpanan lebih tinggi dari bunga kredit<sup>7</sup> bank-bank yang menerapkan prinsip bagi hasil melenggang tanpa beban.

Ini bukan sekedar teori atau pun kebetulan, tetapi telah terbukti secara empiris. Di awal krisis pertengahan tahun 1997, bank-bank konvensional kolaps. Bank Mu'amalat Indonesia, satu-satunya bank syari'ah yang ada di Indonesia saat itu, tetap segar. Pada waktu itu, bank Indonesia menerapkan *tight money policy* (kebijakan uang ketat) dengan menetapkan bunga simpanan mencapai atau pun inflasi mencapai 70%<sup>8</sup> per tahun. Dengan meningkatkan bunga hingga setinggi itu, dana masyarakat akan tersedot ke sistem perbankan.

Dengan cara itu, mereka berharap masyarakat tidak membeli dolar AS yang tengah menekan rupiah. Di segi lain, kebijakan ini menjadi beban berat yang harus dipikul dunia perbankan (konvensional). Banyak di antara bank-bank itu yang kelimpahan tercekik oleh tingginya bunga. Mereka harus membayar bunga simpanan masyarakat dengan bunga yang tinggi, sementara bank tidak bisa menarik bunga kredit sebesar itu dari para nasabah. Disamping itu bank konvensional dihadapkan dengan kredit macet (*non*

*performing loan*) yang dikucurkan kepada para debitor<sup>9</sup>.

Seharusnya para pemilik bank yang memanfaatkan dana murah masyarakat untuk memperkasakan usaha grup sendiri adalah yang paling bertanggungjawab. Namun seperti yang disaksikan pula, banyak kewajiban yang seharusnya menjadi domain privat, beralih menjadi kewajiban publik. Pemerintah – dengan menggunakan dana rakyat – menjadi bagaikan pahlawan merekapitulasi bank-bank itu. Tidak hanya itu saja, kredit macet (*non-performing loans* atau NPL) mereka pun ditarik oleh pemerintah dan kemudian dialihkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)<sup>10</sup>. Pembukuan mereka menjadi 'putih bersih', seolah-olah tidak ada noda kredit macet lagi.

Apakah permasalahan selesai? Ternyata usaha yang telah menelan triliunan rupiah uang rakyat belum benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan. Selain fungsi intermediasi - fungsi utama perbankan sebagai penggerak sektor riil-masih kecil, mereka menjadikan Bank Indonesia sapi perah. Dana triliunan rupiah bukannya digulirkan untuk sektor riil, melainkan ditambatkan pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Tanpa banyak keluar keringat, bank-bank itu melaporkan bisa mencetak laba yang tak lain 'sumbangan tetap' dari bunga SBI yang mereka terima. Waktu berjalan, lima tahun setelah direkap, ternyata bank-bank itu masih juga 'sempoyongan' dan belum tegak bersih Indikasinya. Kali ini mereka dalam bayang-bayang ancaman *virus negative spread*. Bila bank konvensional yang tidak juga menemukan vaksin penangkal *virus negative spread*, perbankan syari'ah relative imun bahkan tidak tersentuh. Bank Mu'amalah Indonesia (BMI) dapat berdiri dengan tegak walau badai

<sup>6</sup>PT BNI Syari'ah (2010), *Dokumen*. BNI Cabang Pekanbaru.

<sup>7</sup>Danastri Sisherdianti (2009), "Faktor-Faktor Variabel Makroekonomi Yang Mempengaruhi Kekuatan Bank Syari'ah", *Tesis*. Universitas Indonesia (UI), hal. 3.

<sup>8</sup>Bacharuddin Jusuf Habibie (2006), *Detik-Detik Yang Menentukan, Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. Cetakan Kedua, THC Mandiri, Jl Kemang Selatan No. 98 Jakarta 12560 – Indonesia, hal. 108.

<sup>9</sup>Dharma Setiawan (2007), "Analisis Terhadap Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada PT. Bank Ekspor Indonesia", *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Gunadarma, hal. 2.

<sup>10</sup>Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), hal. 1.

krisis moneter menerjang dunia perekonomian<sup>11</sup> yang kemudian disusun oleh Bank Syari'ah Mandiri yang tidak terkena *negative spread* karena berdasarkan bagi hasil bukan menggunakan instrument bunga.

Meski bank-bank syari'ah tidak terkena *virus negative spread*, namun tak banyak 'menolong' wajah perbankan nasional. Karena kontribusi perbankan berbasis syari'ah masih sangat kecil. Contohnya saja pada bulan desember tahun 2002, *share* perbankan syari'ah terhadap perbankan nasional baru 0.34% atau Rp3.67 triliun. Sedang dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh bank syari'ah baru sekira Rp2.5 triliun atau 0.31% dari total DPK bank nasional<sup>12</sup>.

Kendati demikian, satu hal yang patut dibanggakan bahwa syari'ah telah melakukan fungsi intermediasi perbankan dengan sangat bagus. Ini bisa dilihat dari rasio pembiayaan terhadap dana ketiga (FDR) yang dihimpun mencapai 103.6%. Bandingkan dengan perbankan nasional yang nisbah antara pengucuran kredit dan dana masyarakat yang disimpan (LDR) hanya 73.9%. Belum lagi kalau dilihat dari kredit bermasalah. Pada periode itu, NPL bank syari'ah mencapai 3.18% sedang untuk perbankan konvensional – yang sebelumnya kredit macetnya banyak yang sudah dialihkan ke BPPN- masih membukukan NPL hingga 10.8%<sup>13</sup>.

Apabila bank-bank penerima rekapitulasi itu dikonversi menjadi syari'ah, tentu bukan hanya akan terhindar dari ancaman penyakit *negative spread*, melainkan juga tidak membebani APBN karena pemerintah tidak lagi menyediakan dana untuk membayar bunga rekap. Siapkah pemerintah mengkonversi bank konvensional menjadi bank syari'ah?

Setelah hampir dua dasawarsa perbankan Islam eksis di Indonesia, apa yang

kini menjadi kendala potensial penghambat pertumbuhannya? Banyak kalangan menyebut modal sebagai batu sandungan paling riil. Ini tidak salah. Kenyataannya, modal yang dimiliki oleh perbankan syari'ah tidak sampai 5% dari akumulasi modal perbankan konvensional.

Sesungguhnya, modal bukanlah segalanya. Persoalan yang dihadapi perbankan syari'ah kini seperti halnya masalah perbankan konvensional untuk menyalurkan kredit. Bedanya, peran intermediasi perbankan syari'ah lebih menonjol daripada teman sejawatnya bank konvensional. "Ibaratnya, kita kelebihan air, tapi sulit mencari sawah yang menjanjikan untuk dialiri."

Perbankan setelah meraih syari'ah award untuk kategori praktisi, ibarat supplier. Peran pokoknya adalah bagaimana menyediakan dana untuk kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan, yaitu sektor produktif. Dana inilah 'air' nya sedangkan 'sawah-sawah' itu adalah sektor produktif yang berperan sebagai *demand* nya. Sekarang ini cukup sulit untuk mencari *demand* nya.

Sulitnya mencari *demand* yang menjanjikan itu membuat perbankan sangat hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan<sup>14</sup>. Dalihnya, kondisi perekonomian belum sepenuhnya pulih. Itu artinya, risiko terjadinya kredit macet besar. Belum lagi tergerusnya rasio kecukupan modal (CAR) bila nyata-nyata pembiayaan itu menjadi macet. Mudah dimengerti bila perbankan konvensional lebih suka memarkir dananya di SBI daripada menyalurkannya untuk sektor produktif. Sebab, selain memberikan bunga lumayan SBI juga dijamin lebih aman. Bila tren ini terus dipelihara, sebetulnya perbankan itu bukannya berperan sebagai 'air', tapi 'sawah' atau bergeser dari fungsi sebagai *supplier* menjadi *demand* dengan bergantung kepada Bank Indonesia<sup>15</sup>.

<sup>11</sup>Ika Septianawati (2015), "Pengaruh Wawasan, Skill dan Etika Pegawai Bank terhadap Kualitas Pelayanan BNI Syari'ah Cabang Kediri", *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri, Tulungagung, Jawa Timur, hal. 2.

<sup>12</sup>Direktorat Perbankan Syari'ah Bank Indonesia.

<sup>13</sup>Sumber: Bank Indonesia, 2008.

<sup>14</sup>Reniaty (2014), "Pengembangan Perbankan Syari'ah Untuk Meningkatkan Entrepreneurship", *Jurnal*. Universitas Bangka Belitung, hal. 4.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hal. 4.



## Perbandingan Dalam Penyelesaian Krisis Malaysia<sup>16</sup> - Indonesia

Dalam kasus krisis ekonomi yang terjadi di negara Malaysia dan seluruh mekanisme yang mereka terapkan hingga kondisi ekonomi Malaysia kembali bangkit dan stabil, ada beberapa studi perbandingan yang bisa kita lakukan. Pada masa krisis ekonomi yang melanda negara Malaysia tahun 1997 Perdana Menteri Mahathir Muhammad mengambil tindakan cepat untuk menyelamatkan negara Malaysia dari krisis tersebut dan Malaysia dengan terangnya menolak bantuan IMF (*International Monetary Fund*)<sup>17</sup>.

Salah satu tuduhan Mahathir pada masa itu bahwa penyebab krisis ekonomi di negara Malaysia disebabkan oleh spekulasi mata uang. Dan salah satu orang yang paling bertanggung jawab menurut beliau adalah George Soros. Serangan verbal terhadap George Soros dipertemuan World Bank pada bulan September 1997 di Hongkong adalah kritik terbuka pertama dari seorang perdana menteri, tentang perdagangan mata uang spekulatif dan sistem tingkat nilai tukar<sup>18</sup>.

Keputusan Mahathir pada masa itu adalah menerapkan kebijakan moneter dalam bentuk kontrol modal selektif. Berbagai pihak menganggap jika Mahathir tidak mempergunakan pengaruh politiknya dengan kuat maka semua itu menjadi sulit untuk bisa diwujudkan, artinya memungkinkan Malaysia masuk dalam krisis ekonomi. Ini sebagaimana dikatakan oleh Mahani Zainal Abidin<sup>19</sup>, bahwa “Sungguh ini lebih merupakan keputusan kepemimpinan politik ketimbang keputusan para teknokrat ekonomi, karena gagasan semacam ini bertentangan dengan ortodoksi ekonomi saat itu. Oleh karenanya, berdasarkan latar belakang di atas, tercapailah konsensus

bahwa Malaysia harus meninggalkan komitmen ortodoksi mata uang yang telah berlangsung 30 tahun.

Untuk mewujudkan semua itu maka dilakukan berbagai langkah-langkah kebijakan yang harus dilaksanakan yang dianggap sebagai pondasi keputusan pendukung kontrol modal selektif. Kontrol modal selektif yang diimplementasikan adalah sebagai berikut<sup>20</sup>:

1. Ringgit dipatok ke dolar AS pada tingkat RM 3.80 per dollar AS.
2. Mereka yang berpergian diperbolehkan mengimpor dan mengeksport Ringgit apabila tidak melebihi RM 1.000 per orang.
3. Ekspor mata uang oleh para warga Malaysia yang berpergian diperbolehkan hingga RM 10.000.
4. Residen diharuskan meminta izin terlebih dahulu untuk mengirimkan dana lebih dari RM 10.000 untuk tujuan investasi luar negeri.
5. Fasilitas-fasilitas kredit domestik bagi bank-bank dan perusahaan-perusahaan pialang saham asing tidak diperbolehkan lagi.
6. Transaksi-transaksi tertentu yang didenominasi dalam Ringgit di antara pihak-pihak non residen yang dilangsungkan melalui rekening eksternal non residen memerlukan persetujuan.
7. Pihak-pihak residen tidak diperbolehkan menerima fasilitas kredit dalam ringgit dari pihak-pihak non residen tanpa persetujuan sebelumnya.
8. Aliran modal jangka pendek disyaratkan tetap berada di dalam negeri setidaknya dalam periode satu tahun. Dana-dana ini, meski demikian, dapat dikelola secara aktif dalam bentuk aset-aset ringgit.
9. Ringgit bukanlah alat tukar yang legal di luar Malaysia.

Dengan dasar kebijakan seperti ini ditambah berbagai kebijakan lainnya sebagai pendukung maka negara Malaysia menjadi negara yang cepat keluar dari krisis ekonomi.

<sup>16</sup>Irham Fahmi (2013), *Ekonomi Politik, Teori dan Realita*. Cetakan Kesatu, Bandung: Alfabeta, hal. 30.

<sup>17</sup>Pikiran Rakyat (2004), *News Paper*. Berita Harian Pikiran Rakyat Malaysia, 6 Februari 2004, hal. 21.

<sup>18</sup>Mahani Zainal Abidin (2005), *Menata Ulang Aturan - Main Rewriting The Rules Crisis Management Model - Sukses Malaysia Mengatasi Krisis Ekonomi '97- '98*. Edisi: -, Jakarta: Prenada, hal. 128.

<sup>19</sup>Mahani Zainal Abidin (2005), *Ibid.*, hal. 131.

<sup>20</sup>Irham Fahmi (2013), *op.cit.* hal. 31.

Sementara Indonesia menjadi negara yang termasuk paling lama keluar dari krisis moneter. Krisis ekonomi di Indonesia sebenarnya sudah menjelma menjadi krisis *multidimensi* dan berdampak ke dalam politik sampai terpisahnya Timor-Timur dari Indonesia tahun 1999<sup>21</sup> serta krisis kepercayaan masyarakat dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar negeri tidak lagi percaya akan kemampuan Indonesia untuk menanggulangi sendiri krisisnya, bahkan mereka juga tidak lagi percaya pada niat baik atau keseriusan pemerintah dalam menangani krisis ekonomi di dalam negeri. Oleh karena itu, satu-satunya yang masih bisa menjamin kembali kepercayaan terhadap Indonesia adalah melakukan “kemitraan usaha” sepenuhnya antara pemerintah Indonesia dan IMF. Kunci untuk menyelesaikan permasalahan tersebut terletak pada kedudukan dan peran Bank Indonesia<sup>22</sup>.

Menurut IMF, krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia disebabkan karena pemerintah baru meminta bantuan IMF setelah rupiah sudah sangat terdepresiasi. Strategi pemulihan IMF dalam garis besarnya adalah mengembalikan kepercayaan pada mata uang, yaitu dengan membuat mata uang itu sendiri menarik. Inti dari setiap program pemulihan ekonomi adalah restrukturisasi sektor finansial<sup>23</sup>. Sementara itu pemerintah Indonesia telah enam kali memperbaharui persetujuannya dengan IMF, *Second Supplementary Memorandum of Economic and Financial Policies* (MEFP) tanggal 24 Juni, kemudian 29 Juli 1998, dan yang terakhir adalah review yang keempat, tanggal 16 Maret 1999. Program bantuan IMF pertama

ditanda-tangani pada tanggal 31 Oktober 1997.

Program reformasi ekonomi yang disarankan IMF ini mencakup empat bidang<sup>24</sup>: Penyehatan sektor keuangan; Kebijakan fiskal; Kebijakan moneter; dan Penyesuaian struktural. Untuk menunjang program ini, IMF akan mengalokasikan *stand-by credit* sekitar US\$ 11.3 milyar selama tiga hingga lima tahun masa program. Sejumlah US\$ 3.04 milyar dicairkan segera, jumlah yang sama disediakan setelah 15 Maret 1998 bila program penyehatannya telah dijalankan sesuai persetujuan, dan sisanya akan dicairkan secara bertahap sesuai kemajuan dalam pelaksanaan program. Dari jumlah total pinjaman tersebut, Indonesia sendiri mempunyai kuota di IMF sebesar US\$ 2.07 milyar yang bisa dimanfaatkan<sup>25</sup>.

Di samping dana bantuan IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan negara-negara sahabat juga menjanjikan pemberian bantuan yang nilai totalnya mencapai lebih kurang US\$ 37 milyar. Namun bantuan dari pihak lain ini dikaitkan dengan kesungguhan pemerintah Indonesia melaksanakan program-program yang diprasyaratkan IMF.

Sudah berhasilkah IMF yang menjadi solusi buat Indonesia untuk menangani krisis moneter? Ternyata tidak. IMF tidak memiliki program khusus yang secara langsung ditujukan untuk menguatkan kembali nilai tukar rupiah, juga tidak ada *Appendix* untuk masalah ini. IMF tidak memecahkan permasalahan yang utama dan yang paling mendesak secara langsung. IMF sendiri tampaknya tidak tahu apa yang harus dilakukannya dan berputar-putar pada kebijakan surplus anggaran, uang ketat, tingkat bunga tinggi, pembenahan sektor riil yang memang perlu dan sudah sangat mendesak, dan titipan-titipan khusus dari negara-negara maju yaitu membuka peluang investasi yang seluas-luasnya bagi mereka dengan menggunakan kesempatan dalam kesempatan Indonesia<sup>26</sup>. Tidak adanya program dari IMF yang jelas dan berjangka

<sup>21</sup>Tyas Suartika (2015), “Korban Jajak Pendapat di Timor-Timur 1999”, *e-Journal*. Avatar, e-Journal Pendidikan Sejarah, Volume 3, No.1, Maret 2015, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, hal. 20.

<sup>22</sup>Bacharuddin Jusuf Habibie (2006), *op.cit.* hal. 108.

<sup>23</sup>Lepi T. Tarmidi (1999), “Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran”, *Buletin*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Maret 1999, Universitas Indonesia, hal. 9.

<sup>24</sup>Lepi T. Tarmidi (1999), *Ibid.*, hal. 9.

<sup>25</sup>Lepi T. Tarmidi (1999), *Ibid.*, hal. 9.

<sup>26</sup>Lepi T. Tarmidi (1999), *Ibid.*, hal. 14.

pendek untuk mengembalikan nilai tukar rupiah ke tingkat yang wajar dan menstabilkannya membuat pemerintah cukup lama terombang-ambing antara memilih program IMF atau *currency board system*, yang justru menjanjikan kepastian dan kestabilan nilai tukar pada tingkat yang wajar.

Krisis ekonomi yang tengah berlangsung ini memang bukan tanggung-jawab IMF dan tidak bisa dipecahkan oleh IMF sendiri. Namun kekurangan yang paling utama dari IMF adalah bahwa IMF dalam program bantuannya tidak mencari pemecahan terhadap masalah yang pokok dan sangat mendesak ini dan berputar-putar pada reformasi struktural yang dampaknya jangka panjang. Bila semua kekuatan bantuan ini dikumpulkan sekaligus secara dini, maka hal ini dengan cepat akan memulihkan kembali kepercayaan masyarakat dalam negeri dan internasional. Namun bantuan dana IMF dan ketergantungan harapan pada IMF ini disalahgunakan untuk menekan pemerintah Indonesia untuk melaksanakan reformasi struktural secara besar-besaran<sup>27</sup>. Ibaratnya orang yang sudah hampir tenggelam diombang-ambing ombak laut tidak segera ditolong dengan dilempari pelampung, tapi disuruh belajar berenang dahulu. Dari mana Indonesia bisa keluar dari krisis moneter? Ternyata dari kepercayaan dan kekuatan masyarakat, rakyat Indonesia sendiri yang percaya terhadap industri perbankan nasional, yang menjadi salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga dapat mencegah krisis tersebut agar tidak terulang dikemudian hari<sup>28</sup>.

## Peran Perbankan Syari'ah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Malaysia – Indonesia

Krisis moneter itu ternyata menyadarkan kita tentang pentingnya kembali kepada prinsip syari'ah dan kembali memperdayakan ekonomi rakyat. Karena Tujuan dari dibuatnya syari'at sebagaimana disebutkan oleh imam as-Syathibi adalah untuk mewujudkan *adharuriyat alkhomsyah* yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akan dan harta<sup>29</sup>. Sedangkan memperdayakan ekonomi rakyat adalah sebuah paradigma pembangunan yang tidak menyerahkan sepenuhnya pertumbuhan ekonomi pada peran pengusaha-pengusaha besar, melainkan pada semua pihak terutama usahamikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Peran Bank syari'ah dalam penguatan ekonomi umat adalah dengan beberapa cara: penghapusan riba<sup>30</sup>, penyediaan modal usaha, pemenuhan kebutuhan hidup, penyaluran dana *corporate social responsibility* (CSR), alokasi dana *qordhul hasan*, penyuluhan dan pembinaan masyarakat dan peningkatan kesempatan kerja<sup>31</sup>.

Pengembangan bank syari'ah di Indonesia jelas bertujuan menerapkan perbankan etik yaitu tidak sekedar menjual jasa atau produk perbankan dengan mengenakan bunga, tetapi “bekerjasama dengan klien” untuk memperbaiki kesejahteraan atau meningkatkan kehidupan ekonomi klien<sup>32</sup>.

<sup>29</sup> As-Syathibi (t.t.), *Al-Muwafaqot*. Beirut: 1999, Vol: I, hal. 54.

<sup>30</sup> QS: al-Baqarah (2): 275-276. Dalam hadits: “Jabir mengatakan bahwa Rasulullah s.a.w. melaknat pemakan bunga, pembayarnya, penulisnya dan dua saksinya. Dan Beliau bersabda “Mereka sama (dalam dosa)” (Muslim).

<sup>31</sup> Maman Surahman (2014), “Peranan Bank Syari'ah Dalam Pembangunan Ekonomi Umat”, *Makalah*. Prodi Keuangan dan Perbankan Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Bandung, hal. 4.

<sup>32</sup> Syafi'I Antonio dan Aam S. Rusydiana (2014), “Peranan Ekonomi Syari'ah Dalam Pembangunan Daerah”, *Jurnal. Jurnal Harmoni*, Januari – Maret 2010, STEI Tazkia Bogor, Komite Ahli Bank Indonesia dan Dewan Syari'ah Bank Negara Malaysia, hal. 54.

<sup>27</sup> Lepi T. Tarmidi (1999), *Ibid.*, hal. 14.

<sup>28</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, hal. 1.



Setidaknya ada tiga hal yang menjadi sumbangan ekonomi syari'ah bagi pembangunan ekonomi nasional Indonesia<sup>33</sup>: *Pertama*, ekonomi syari'ah memberikan andil bagi perkembangan sektor riil. Pengharaman terhadap bunga bank dan spekulasi mengharuskan dana yang dikelola oleh lembaga-lembaga keuangan syari'ah disalurkan ke sektor riil.

*Kedua*, ekonomi syari'ah lewat industri keuangan syari'ah turut andil dalam menarik investasi luar negeri ke Indonesia, terutama dari negara-negara Timur-Tengah. Adanya berbagai peluang investasi syari'ah di Indonesia, telah menarik minat investor dari negara-negara *petro-dollar* ini untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Minat mereka terus berkembang dan justru negara kita yang terkesan tidak siap menerima kehadiran mereka karena berbagai 'penyakit akut' yang tidak *investor friendly*, seperti rumitnya birokrasi, faktor keamanan, korupsi, dan sebagainya.

*Ketiga*, gerakan ekonomi syari'ah mendorong timbulnya perilaku ekonomi yang etis di masyarakat Indonesia. Ekonomi syari'ah adalah ekonomi yang berpihak kepada kebenaran dan keadilan dan menolak segala bentuk perilaku ekonomi yang tidak baik seperti sistem riba, spekulasi, dan ketidakpastian (*gharar*).

Ekonomi syari'ah telah membuktikan sumbangannya bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Meski masih relatif kecil namun bukan tidak berharga sama sekali. Ekonomi syari'ah telah mengajarkan pentingnya kemandirian, kerja keras, semangat *entrepreneurship*, *good governance*, dan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam berekonomi. Semua hal ini diperlukan bagi tercapainya cita-cita Proklamasi 1945 untuk mensejahterakan kehidupan bangsa, yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur<sup>34</sup>.

Sedangkan di Malaysia peran perbankan syari'ah memposisikan Malaysia

sebagai pusat keuangan Islam antarbangsa<sup>35</sup>. Dengan Posisi kemajuan yang dicapai dalam sistem keuangan sepanjang dekade yang lalu meletakkan pondasi untuk pertumbuhan pada masa yang akan datang dan pembangunan sistem keuangan dalam tempo 10 tahun mendatang. Sistem keuangan Malaysia yang telah berdiri di depan ini dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara bahkan salah satu terbesar di dunia akan mengantarkan Malaysia sesuai dengan fungsi perbankan syari'ah tersebut dengan lebih berkesan sejajar dengan matlamat Malaysia untuk menjadi negara berperekonomian maju tahun 2020<sup>36</sup>. Memiliki total aset sistem lebih dari 200 juta ringgit atau sekitar 20% dari aset total perbankan Malaysia menjadi penyumbang utama bagi perkembangan perbankan dan keuangan Islam antarbangsa<sup>37</sup> dan menjadi sumber modal pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah, sesuai dengan fungsi perbankan dan keuangan syari'ah saat ini sebagai lembaga pembiayaan untuk mendukung aktivitas bisnis dan juga perdagangan<sup>38</sup>.

Dengan pasaran sukuk yang terbesar di dunia, dan sebagai pusat terkemuka bagi ekuiti Islam, pengurusan dana Islam, perbankan Islam dan takaful, Malaysia merupakan pusat bagi kebanyakan kumpulan keuangan antarabangsa utama yang menawarkan produk dan perkhidmatan

<sup>35</sup>Bank Negara Malaysia (2001), *Tinjauan Keseluruhan*. The Central Bank of Malaysia (Malay: Bank Negara Malaysia), abbreviated BNM, is the Malaysian central bank. Established on 26 January 1959 as the Bank Negara Malaya, its main purpose is to issue currency, act as banker and adviser to the Government of Malaysia and regulate the country's financial institutions, credit system and monetary policy. Its headquarters is located in Kuala Lumpur, the federal capital of Malaysia, hal. 48.

<sup>36</sup>Bank Negara Malaysia (2001), *Ibid.*, hal. 10.

<sup>37</sup>Abdul Aziz Setiawan (2005), "Prospek Perbankan Syari'ah 1426 H", *Artikel*. Majalah Hidayatullah Edisi 12 / XVII / April 2005, hal. 30-31.

<sup>38</sup>Aziz Budi Setiawan (2006), "Perbankan Syari'ah; Challenges dan Opportunity untuk pengembangan di Indonesia", *Jurnal*. Jurnal Kordinat: Vol. VIII No. 1 April 2006, Fakultas Ekonomi, Universitas Jakarta, hal. 3.

<sup>33</sup>Syafi'I Antonio dan Aam S. Rusydiana (2014), *Ibid.*, hal. 51.

<sup>34</sup>Syafi'I Antonio dan Aam S. Rusydiana (2014), *Ibid.*, hal. 56.

keuangan Islam. Malaysia juga telah memberikan tumpuan pada usaha menggalakkan dialog global bagi memudahkan pertumpuan hukum dan piawai syari'ah. Selain itu, Malaysia telah menyertai secara aktif pembentukan institusi-institusi antarabangsa, yaitu Lembaga Perkhidmatan Kewangan Islam (IFSB) dan Perbadanan Antarabangsa Pengurusan Mudah Tunai Islam (IILM) sebagai sebahagian daripada usaha bersama pada peringkat antarabangsa untuk menggalakkan kestabilan kewangan dalam sistem kewangan Islam<sup>39</sup>.

Malaysia sudah pun mempunyai jenama yang kukuh yang terbukti dengan kehadiran institusi asing yang semakin ketara dan tahap penyertaan asing yang lebih tinggi dalam pasaran keuangan Islam domestik khususnya dalam pasaran sukuk. Manakala pasaran sukuk kini mencakupi 55% daripada pasaran sektor sekuriti hutang. Dengan liberalisasi sistem keuangan Islam yang meningkat, kini Malaysia juga telah muncul sebagai pusat keuangan Islam terkemuka pada peringkat antarabangsa dengan perkembangan yang pesat 6% kepada 22% dalam sektor perbankan keseluruhan sejak sedekad yang lalu<sup>40</sup>.

Daripada kedudukan yang terbina kukuh ini, inisiatif akan dilaksanakan bagi mempercepat pengantarabangsaan keuangan Islam pada masa hadapan, sekaligus menjadikan peranan sistem keuangan lebih penting dalam pengantaraan aliran keuangan antarabangsa. Ini akan merangkumi penawaran lebih banyak produk dan perkhidmatan keuangan Islam yang inovatif yang akan memenuhi permintaan global yang lebih bermacam terhadap penyelesaian keuangan berlandaskan syari'ah. Persekitaran yang diperlukan di Malaysia juga perlu diperkukuh lagi dengan bermacam rangkaian perkhidmatan sokongan, saluran penyampaian yang lebih cekap, bekalan tenaga kerja mahir berkualiti tinggi yang mencukupi dan rejim pengawalseliaan yang

kukuh untuk menggalakkan pertumbuhan dan pembangunan keuangan Islam yang teguh dan stabil. Sementara itu, pembiayaan yang berlandaskan prinsip Islam juga dijangka berkembang untuk mencakupi 40% daripada jumlah pembiayaan pada tahun 2020 (2010: 29%). Kadar pertumbuhan industri keuangan Islam domestik dijangka terus mampan dalam dekade ini, diperkukuh oleh jangkauan dan inovasi produk yang lebih besar<sup>41</sup>.

### **Perbandingan Grand Strategy Pengembangan Perbankan Syari'ah-Indonesia - Malaysia**

Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syari'ah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yang meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2016 sebagai industri perbankan syari'ah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syari'ah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syari'ah lebih dari sekedar bank<sup>42</sup>. Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari grand strategy pengembangan pasar keuangan perbankan syari'ah, antara lain adalah sebagai berikut<sup>43</sup>:

Pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syari'ah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syari'ah sebagai *Beyond Banking*, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syari'ah Indonesia sebagai

<sup>39</sup>Bank Negara Malaysia (2001), *op.cit*.hal. 32.

<sup>40</sup>Bank Negara Malaysia (2001), *op.cit*.hal. 40.

<sup>41</sup>Bank Negara Malaysia (2001), *op.cit*.hal. 40.

<sup>42</sup>Bank Indonesia (BI), *Sekilas Perbankan Syari'a di Indonesia*.Perbankan Syari'ah Indonesia.

<sup>43</sup>Bank Indonesia (BI), *Ibid*,Perbankan Syari'ah Indonesia.

perbankan syari'ah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syari'ah Indonesia sebagai perbankan syari'ah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.

Kedua, program pencitraan baru perbankan syari'ah yang meliputi aspek positioning, differentiation, dan branding. Positioning baru bank syari'ah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu *up-date* dan *user friendly*, serta adanya ahli investasi keuangan syari'ah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah "bank syari'ah lebih dari sekedar bank atau *beyond banking*".

Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syari'ah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syari'ah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syari'ah.

Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.

Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syari'ah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syari'ah. Dan keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung yang

bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syari'ah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Adapun strategi utama konsep pengembangan bank syari'ah di masa depan adalah "*transformasi*" terutama harus dilakukan oleh kalangan internal perbankan syari'ah<sup>44</sup>. Transformasi itu adalah pertama. Transformasi dari produk syari'ah ke korporat syari'ah. Kedua, transformasi dari sentimen emosional ke rasional professional. Ketiga transformasi dari pelanggan muslim ke pelanggan umum. Keempat transformasi dari pengusaha besar kepada orientasi yang lebih adil. Kelima transformasi dari motif investasi ke akumulasi modal.

Konsep pengembangan bank syari'ah di masa depan dapat dilakukan dengan langkah langkah berikut<sup>45</sup>: Langkah pertama, pengembangan usaha yang perlu dilakukan banks syari'ah di masa depan yaitu menciptakan sumber dana yang stabil untuk mendukung proses penciptaan investasi dengan lebih baik. Langkah kedua, yaitu masalah ketidakjelasan pendapatan masa depan, dapat diminimalisasi dengan menempatkan deposit tidak hanya sebagai *sleeping partnership*, tetapi juga sebagai mitra yang sebanding dengan pengusaha. Langkah ketiga, yaitu penciptaan produk keuangan baru dalam perbankan syari'ah. Langkah keempat, yaitu pemerintah harus mengambil inisiatif untuk menciptakan suatu sistem pendidikan ekonomi yang telah memasukkan konsep syari'ah di dalamnya. Langkah kelima, perlu adanya langkah riil dari pihak bank syari'ah untuk meningkatkan penelitian dan pengembangan.

Selain itu pengembangan perbankan syari'ah agar dapat mengatasi hambatan dan tantangan di era yang akan datang dapat dilakukan dengan segitiga fungsional pengembangan bank syari'ah<sup>46</sup>, dimana di sisi pertama adalah mengenai *development* dan *human resources*, yang kedua adalah

<sup>44</sup>Iman Hilman (2003), *Perbankan Syari'ah Masa Depan*. Jakarta: Senayan Abadi, hal. 14.

<sup>45</sup>Iman Hilman (2003), *Ibid.*, hal.30.

<sup>46</sup>Iman Hilman (2003), *Ibid.*, hal. 111.

marketing sistem dan internal prosedur, sedangkan yang ketiga adalah support dan teknologi. Dari konsep ini diyakini jika dijalankan dengan baik, didukung oleh manajemen yang baik, karyawan yang punya skill baik, dan tidak melupakan satu bagian sudut dengan sudut yang lain, maka target untuk pengembangan perbankan syari'ah menuju masa depan akan merupakan *achievement*, bukan lagi sekedar target.

Melihat kepada kerajaan Malaysia dalam pengembangan perbankan syari'ah bermula dari pengalaman yang cukup panjang<sup>47</sup>. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di Malaysia telah muncul sejak 1969 dan telah berevolusi sebagai komponen yang viable dan kompetitif dari sistem keuangan secara keseluruhan. Strategi yang diambil, dengan dukungan penuh dari kerajaan Malaysia, adalah mengembangkan sistem keuangan Islam yang menyeluruh yang beroperasi berdampingan dengan sistem konvensional, terutama infrastruktur perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, dan pasar keuangan (pasar modal dan pasar uang) syari'ah. *Intra-dependency* dari komponen struktural ini menciptakan *enabling environment* bagi sistem keuangan untuk beroperasi secara efisien. Saat ini pangsa bank syari'ah telah mencapai hampir 25%.

Tahapan pengembangan LKS dilakukan dalam beberapa fase: Fase I (1983-1992), *established an enabling financial infrastructure*. Tahun 1983 Pembentukan UU Bank Islam dengan Pendirian Bank Islam Malaysia Berhad, BNM berwenang mengatur dan mengawasi. Tahun 1983 pembentukan UU Investasi Kerajaan, *Government Investment Issues*. Tahun 1984 dibentuk UU Takaful, berdiri Syarikat Takaful Malaysia, Bank dan asuransi syari'ah serta Dewan Pengawas Syari'ah.

Fase II (1993-2003), *Created critical mass in Islamic Banking, Stimulate competition in Takaful industry, Established*

*Islamic Money Market, and Developed Islamic Capital Market*. Tahun 1993 Memperkenalkan Islamic windows dengan tiga bank sebagai pilot projek, 54 lembaga keuangan menawarkan produk dan jasa syari'ah. Mengeluarkan izin bagi tiga perusahaan takaful. Tahun 1994, mendirikan pasar uang syari'ah dengan berdayak pada pertumbuhan instrumen keuangan syari'ah. Tahun 1996, mendirikan pasar modal syari'ah dengan adanya pertumbuhan sekuritas syari'ah;

Fase III (2000 sampai sekarang), *Financial Sector Master Plan (FSMP), Strengthening further Institutional structure, Liberalization of Islamic banking and takaful sector, Enhance regulatory framework, Strengthen legal framework; Strengthen Shariah framework, Shariah governance framework, and Create Shariah experts and Harmonization of Shariah interpretation*. Tahun 2000, FSMP berjangka sepuluh tahun merupakan arahan strategis untuk menciptakan sistem keuangan Islam yang efisien, progresif dan komprehensif. Tahun 2004, melakukan peninjauan kembali Islamic windows dengan membolehkan transformasi Islamic windows menjadi subsidiary. Tahun 2004, liberalisasi perbankan dan asuransi syari'ah dengan mengeluarkan izin tiga LKS asing dan empat takaful dengan partisipasi pihak asing. Memperbaiki kerangka regulatory, prudential, dan operational, meninjau kembali proses legislasi dan pengadilan, mengembangkan kerangka governance syari'ah berupa Shariah Advisory Council di BNM dan Shariah Committee di LKS, membentuk dana amal (endowment funds) bagi pakar syari'ah untuk mendukung perannya.

Kesimpulannya, dalam mengembangkan sistem keuangan syari'ah, kerajaan Malaysia menempuh "*pragmatic and gradual approach*", mengembangkan sistem yang menyeluruh, dan memberikan komitmen yang kuat untuk memastikan keberhasilannya. Sistem keuangan Islam harus didukung oleh "*enabling*" infrastruktur keuangan Islam dalam bentuk

<sup>47</sup>Pengembangan Perbankan Syari'ah Malaysia diambil dari pidato Dato' Mohd Razif Abd. Kadir bertajuk "Malaysia's Experience In Developing Islamic Financial System." Assistant Governor Bank Negara Malaysia.



pengembangan institusional, kerangka regulasi, dan kerangka legal dan syari'ah.

### **Iklim Investasi Indonesia - Malaysia**

Indonesia dan Malaysia memiliki iklim investasi yang luar biasa. Indonesiamemiliki bonus alam maha kaya dan demografi serta prospek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga dijangkakan peran perbankan syari'ah dapat terasa signifikan bagi masyarakat terutama mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara sehingga sangat kondusif untuk menanamkan investasi di Indonesia, sedangkan di negara Jiran bonus alam tidak sekaya Indonesia dan juga demografi yang lebih kecil.

Kendala yang sangat disayangkan dan telah lama berlarut-larut terjadi di Indonesia adalah prosedur perijinan yang kompleks, lama dan relatif mahal. Untuk memulai usaha dibutuhkan sebanyak 12 prosedur dalam jangka waktu 151 hari terlama kedua di Asia setelah Laos, dan biaya kurang lebih 130.6% pendapatata per kapita ketujuh termahal di Asia setelah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Lebanon, Korea, Kamboja, dan Yaman<sup>48</sup>. Berbeda dengan Malaysia yang memudahkan prosedur perijinan dengan semudah-mudahnya hanya memerlukan waktu 30 hari dengan jumlah prosedur 9, ditambah biaya 25.1% dari pendapatan per kapita dan modal minimum 0.0%<sup>49</sup>. Melihat yang demikian maka dibuat terobosan baru tahun 2016 dalam dalam ijin investasi di Indonesia yang diluncurkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau *Indonesia Investment Coordinating Board* yaitu Prosedur Layanan Ijin Investasi dalam 3 Jam<sup>50</sup>. Hal demikian diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Dengan memudahkan prosedur perijinan yang awalnya begitu ribet

dan membingungkan maka diharapkan stigma berinvestasi di Indonesia yang sulit dapat dihilangkan.

Faktor utama dalam iklim investasi mencakup stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial dan politik. *Kepemerintahan dan kelembagaan* termasuk kejelasan dan efektifitas peraturan, perpajakan, sistim hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan trampil. *Infrastruktur* mencakup antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, listrik dan air<sup>51</sup>.

Bagi Malaysia, tiga faktor utama tersebut yang mendukung investasi telah terpenuhi. Oleh karenanya Malaysia berada di posisi ke-6 dunia, masuk dalam *top ten* negara-negara yang ramah untuk berinvestas. Sedangkan Indonesia berada di posisi ke-120 dari 189 negara di dunia. Sedangkan Singapura berada di posisi ke-1 dunia yang dipegang dalam jangka waktu 8 tahun berturut-turut<sup>52</sup>. Salah satu keunggulan Malaysia tersebut adalah karena kepedulian kerajaan dalam peningkatan kualitas birokrasi khususnya investasi di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak, meskipun negara Malaysia sejauh ini belum sepenuhnya terbebas dari praktik korupsi.

Sedangkan penurunan investasi Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Pertama korupsi yang sangat akut di Indonesia serta kepastian hukum yang kurang bagi para investor dalam kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi keuntungan neto atas biaya resiko jangka panjang dari kegiatan investasi serta hak milik mulai dari tanah sampai kontrak. Kedua adalah infrastruktur dan hampir pada semua jenis infrastruktur dasar (listrik,

<sup>48</sup>Tim Investasi, Direktorat Perencanaan Makro, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Agustus 2005.

<sup>49</sup>Sumber: World Bank (2005), (dikuti dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin – Indonesia – Jetro 2006)).

<sup>50</sup>Investasi Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 7 Maret 2016.

<sup>51</sup>Asian Development Bank (2005), *Jalan Menuju Pemulihan, Memperbaiki Iklim Investasi di Indonesia*. Economics and Research Department Development Indicators and Policy Research Division, hal. 3.

<sup>52</sup>Word Bank (2014), *Doing Business 2014*. Laporan Bank Dunia, dirilis Selasa, 29 Oktober 2013.



telekomunikasi, prasarana jalan dan pelabuhan) Indonesia terlambat dalam hal pengembangan. Ketiga, *good governance* yang kurang seringkali ditemukan karena banyak kebijakan yang tidak konsisten dan tumpang tindih antara peraturan di tingkat pusat dan daerah. Keempat stabilitas ekonomi, politik dan sosial<sup>53</sup>. Oleh karena itu Presiden Indonesia Ir. Hj Joko Widodo terus menggenjot pembangunan infrastruktur dan pembersihan biokrasi dari korupsi agar iklim investasi Indonesia menjadi ramah dan kondusif bagi bangsa lain.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan potensi alam yang luar biasa dibanding Malaysia, untuk dijadikan tempat yang kondusif dalam berinvestasi sedangkan kekurangannya regulasi, infrastruktur biokrasi dan korupsi yang harus segera dibenahi. Sementara Malaysia, potensi alam yang lebih terbatas dibanding dengan Indonesia tetapi memiliki kelebihan dalam regulasi, infrastruktur dan biokrasi yang lebih unggul berbanding Indonesia.

## Penutup

Berdasarkan paparan penulis di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting yang menjadi *power point*nya adalah:

1. Ekonomi Syari'ah / Perbankan Syari'ah merupakan solusi untuk menghadapi krisis ekonomi global.
2. Tujuan perbankan syari'ah negara Indonesia adalah terwujudnya sistem perbankan syari'ah yang sehat, kuat dan Istiqamah terhadap prinsip syari'ah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan, guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual. Sedangkan perbankan negara Malaysia komited untuk mencapai kecemerlangan dalam usaha melaksanakan sistem moneter

dan kewangan yang stabil dan membentuk sektor kewangan yang kukuh dan progresif bagi mencapai pertumbuhan ekonomi yang mampan demi negara.

3. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Malaysia dan Indonesia secara faktual membantu pertumbuhan ekonomi di kedua negara tersebut yang terbukti sektor ini mampu bertahan saat krisis ekonomi.
4. Perbankan syari'ah merupakan salah satu sektor strategis yang harus dilirik pemerintah untuk menghadapi *negative spread* dan kerentanan ekonomi global.
5. Perbankan syari'ah Indonesia mengembangkan "bank syari'ah lebih dari sekedar bank atau *beyond banking*". Sedangkan perbankan syari'ah Malaysia menempuh "*pragmatic and gradual approach*", mengembangkan sistem yang menyeluruh, dan memberikan komitmen yang kuat untuk memastikan keberhasilannya.
6. Peran perbankan syari'ah Indonesia memberikan sumbangan terhadap pembangunan ekonomi negara dengan memberikan andil terhadap perkembangan sektor riil, menarik investor luar ke Indonesia dan mendorong perilaku ekonomi yang etis di masyarakat. Sedangkan peran perbankan syari'ah Malaysia membawa Malaysia sebagai pusat keuangan Islam antarbangsa, membawa Malaysia menjadi negara berperekonomian maju tahun 2020.
7. Dalam menyelesaikan krisis moneter, Malaysia menolak bantuan IMF (*International Monetary Fund*) tetapi melakukan langkah - langkah dalam mengembangkan perbankan syari'ah. Sedangkan dalam menyelesaikan krisis moneter, Indonesia meminta bantuan IMF (*International Monetary Fund*). Tetapi krisis tidak bisa dipecahkan oleh IMF sendiri. Dengan kembalinya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional yang akhirnya krisis moneter dapat tertanggulangi.

<sup>53</sup>Atika Fazalina (2016), "Pentingnya Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha bagi Penguatan Ekonomi Domestik", *Paper*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga.

8. Latarbelakang berdirinya perbankan syari'ah Malaysia diawali oleh berdirinyasebuah lembaga non-bankyang bertujuan untuk membantu umat Islam di Malaysia menyimpan uang untuk menunaikan ibadah haji dengan didirikannya *Muslim Pilgrims Savings Corporation* tahun 1963. Sedangkan di Indonesia perbankan syari'ah diawali dengan berdirinya BMT (*Baitul Maal dan Tanwil*) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, sebagai lembaga keuangan syari'ah di Indonesia yang ditemui sejak tahun 1984.
9. Iklim investasi Indonesia menjanjikan untuk jangka panjang dengan perbaikan biokrasi dan infrastruktur negara. sedangkan iklim investasi Malaysia masuk dalam *top ten* negara ramah investasi.

#### Daftar Pustaka

- Abidin, Mahani Zainal (2005), *Menata Ulang Aturan Main - Rewriting The Rules Crisis Management Model - Sukses Malaysia Mengatasi Krisis Ekonomi '97-'98*. Edisi: -, Jakarta: Prenada.
- Al-Qur'ān Nūr Karīm, Departemen Agama Republik Indonesia.
- Antonio, Muhammad Syafi'i (2001), *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Cetakan Pertama, Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, Syafi'I dan Aam S. Rusydiana (2014), "Peranan Ekonomi Syari'ah Dalam Pembangunan Daerah", *Jurnal. Jurnal Harmoni*, Januari – Maret 2010, STEI Tazkia Bogor, Komite Ahli Bank Indonesia dan Dewan Syari'ah Bank Negara Malaysia.
- Ascarva (2012), *Akad & Produk Bank Syari'ah*. Cetakan Keempat, Depok: Dicitak oleh PT Rajagrafindo Persada.
- Bank, Asian Development (2005), *Jalan Menuju Pemulihan, Memperbaiki Iklim Investasi di Indonesia*. Economics and Research Department Development Indicators and Policy Research Division, Hak Cipta: Asian Development Bank
- 2005 Hak Cipta Dilindungi.
- Bank, World (2005), "Mendukung Usaha Kecil dan Menengan," *Jurnal.Indonesia Policy Briefs - Gagasan untuk Masa Depan*, Bank Dunia.
- Bank, World (2014), "Doing Business 2014", *Artikel*. Laporan Bank Dunia, dirilis selasa, 29 Oktober 2013.
- Habibie, Bacharuddin Jusuf (2006), *Detik-Detik Yang Menentukan, Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. Cetakan Kedua, THC Mandiri, Jl Kemang Selatan No. 98 Jakarta 12560 – Indonesia.
- Haekal, Muhammad Husain (2004), *Abu Bakr As-Siddiq, Sebuah Biografi dan Studi Analisis tentang Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi*.Cetakan Keempat, Jakarta: Penerbit PT. Pustaka Litera Antar Nusa.
- Hakim, Cecep Maskanul (2008), "Kebijakan Pengembangan Perbankan Syari'ah", *Artikel*. Direktorat Perbankan Syari'ah Bank Indonesia, disampaikan pada Kajian Ekonomi Syari'ah MES Cirebon, 28 Desember 2008.
- Indonesia, Bank (BI) (2002), "Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syari'ah", *Artikel*. Departemen Perbankan Syari'ah, Bank Indonesia.
- Indonesia, Bank (BI) (2009), "Perbankan Syari'ah: Lebih Tahan Krisis Global", *Artikel*. Edukasi Perbankan, Direktorat Perbankan Syari'ah, Jakarta: Bank Indonesia.
- Indonesia, Bank (BI) (t.t.), "Sekilas Perbankan Syari'a di Indonesia", *Artikel*. Perbankan Syari'ah Indonesia.
- Islam, Bank (2009), "Strength in Adversity", *Annual Report 2009*. Bank Islam Malaysia Berhad, Wisma Bank Islam, Bukit Damansara, Kuala Lumpur.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 Tentang

- Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
- Kindleberger, Charles P. (1988), *Manias, Panics and Crashes*. New York: Basic Books.
- Malaysia, Bank Negara (2001), “Tinjauan Keseluruhan”, *Buku Laporan*. The Central Bank of Malaysia (Malay: Bank Negara Malaysia), abbreviated BNM, is the Malaysian central bank.
- Mohd Razif Abd.Kadir (t.t.), “Malaysia’a Experience in Developing Islamic Financial System”, *Paper*. Assistant Governor Bank Negara Malaysia.
- Pikiran Rakyat (2004), *News Paper*. 6 Februari 2004, Malaysia.
- Reniaty (2014), “Pengembangan Perbankan Syariah Untuk Meningkatkan Entrepreneurship”, *Jurnal*. Universitas Bangka Belitung.
- Robert Gilpin and Jean Millis (2002), *Tantangan Kapitalisme Global, Ekonomi Dunia Abad ke-21*. Cetakan Pertama, Jakarta: Divisi Buku Pilihan, PT RajaGrafindo Persada, Murai Kencana.
- Setiawan, Abdul Aziz (2005), “Prospek Perbankan Syariah 1426 H”, *Artikel*. Majalah Hidayatullah Edisi 12 / XVII / April 2005.
- Ulfah, Abdul Aziz dan Mariyah (2010), *Kapita selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Cetakan Kesatu, Bandung: Alfabeta.